# PENGADILAN TINGGI BENGKULU LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 September Tahun 2023

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585

E-mail: pt\_bengkulu@yahoo.co.id



# LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

# Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Ji. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Telp. 073621585 Fax. 073621585
Bengkulu - Bengkulu 38225
E-mail: pt\_bengkulu@yahoo.co.id



# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bengkulu, 16 Oktober 2023 Kuasa Pengguna Anggaran,

H. NURSANI, S.H NIP.196606101991031005

# DAFTAR ISI

# Daftar Isi

Kata Pengantar
Daftar Tabel dan Lampiran       1         Pernyataan Tanggung Jawab       iii         Ringkasan       10         I. Laporan Realisasi Anggaran       14         II. Neraca       16         III. Laporan Operasional       19         IV. Laporan Perubahan Ekuitas       21         V. Catatan atas Laporan Keuangan       23         A. Penjelasan Umum       23         A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu       23         A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan       24         A.3. Basis Akuntansi       24
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan       10         I. Laporan Realisasi Anggaran       14         II. Neraca       16         III. Laporan Operasional       19         IV. Laporan Perubahan Ekuitas       21         V. Catatan atas Laporan Keuangan       23         A. Penjelasan Umum       23         A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu       23         A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan       24         A.3. Basis Akuntansi       24
I. Laporan Realisasi Anggaran
II. Neraca
III. Laporan Operasional
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
V. Catatan atas Laporan Keuangan
A. Penjelasan Umum
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
A.3. Basis Akuntansi
A.3. Basis Akuntansi24
A.4. Dasar Pengukuran24
A.5. Kebijakan Akuntansi25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah33
B.2. Belanja34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
C.1. Aset Lancar
C.2. Aset Tetap
C.3. Kewajiban Jangka Pendek42
C.4. Ekuitas
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak
D.2. Beban Pegawai
D.3. Beban Persediaan

-		TATION 2023	
	D.4.	Beban Barang & Jasa	4!
	D.5.	Beban Pemeliharaan	4
	D.6.	Beban Perjalanan Dinas	46
	D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
	D.8.	Beban Bantuan Sosial	
	D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
	D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	
	D.11.	Beban Lain-lain	
	D.12.	Kegiatan Non Operasional	
	D.13.	Pos Luar Biasa	
	E. P	enjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
	E.1.	Ekuitas Awal	
	E.2.	Surplus (defisit) LO	
	E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	
	E.4.1.	Penyesuaian Nilai Aset	
		Koreksi Nilai Persediaan	
	E.5.	Transaksi Antar Entitas	
	Rinciar	n Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran	
	E.6.	Ekuitas Akhir	
	F.	Pengungkapan Penting Lainnya	
	F.1.		
	F.2.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	
Lan		Pengungkapan Lain-lain	
Lap	oran-iap	oran Pendukung	60

# DAFTAR TABEL

# Daftar Tabel dan Lampiran

Tabella Di Li	
Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022	10
raber 2 kiligkasari Neraca per 30 September TA 2023 dan 2022	
rabei 5 Penggorongan Kualitas Piutang	
raber 4 Taber Massa Manfaat Aset Tetap	20
rabei 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
raber o Perupanan DIPA	
raber / Kirician Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September TA 2023	22
rabel o Perbandingan Realisasi PNBP per 30 September TA 2023 dan 2022	2.4
raber 5 Krician Ariggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023	2.4
rabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023	25
raber 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023 dan TA 2022	25
rabel 12 rei bandingan Belanja Barang per 30 September TA 2023 dan TA 2022	20
rabet 15 kindlan Aset Lancar per 30 September TA 2023 dan 2022	0.7
rabei 14 Kincian Kas di Bendahara Pengeluaran	27
rabel 15 Persediaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022	20
Tabel 16 Rincian Aset Tetap	39
Tabel 17 Rincian Saldo Tanah	39
Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.	. 42
Tabel 19 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September TA 2023 dan 2022	43
Tabel 20 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September TA 2023	44
Tabel 23 Rincian Beban Persediaan per 30 September TA 2023 dan TA 2022	45
Tabel 22 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 September TA 2023 dan TA 2022	45
Tabel 23 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 September TA 2023 dan TA 2022	46
Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September TA 2023 dan TA 2022	46
Tabel 25 Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakatper 30 September TA 2023	47
Tabel 26 Kindian Beban Beban Bantuan Sosial per 30 September TA 2023 dan TA 2022	40
raber 27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 September TA 2023 dan TA 2022	40
Tabel 28 Rincian Beban Piutang Tak Tertagih per 30 September TA 2023 dan TA 2022	40
Tabel 29 Rincian Beban Lain-lain per 30 September TA 2023 dan TA 2022	E0.
Tabel 30 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 September TA 2023 dan TA 2022	50
Tabel 31 Rincian Pos Luar Biasa per 30 September TA 2023 dan TA 2022	51
Tabel 32 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 September TA 2023	4
Tabel 33 Rincian Koreksi Aset Tetap non Revaluasi per 30 September TA 2023	3
Tabel 34 Rincian Koreksi Lain-lain per 30 September TA 2023	4
Fabel 35 Kindian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 September TA 2023	Ε.Δ
Tabel 36 Rincian Fransfer Masuk	
Tabel 37 Rincian Pengesahan Hibah.	56

# PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

## Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Bengkulu - Bengkulu 38225 Telp. 073621585 Fax. 073621585 E-mail: pt\_bengkulu@yahoo.co.id

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, 16 Oktober 2023 Kuasa Pengguna Anggaran,

H. NÜRSANI, S.H NIP.196606101991031005

# RINGKASAN

# Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu triwulan III Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.Laporan Keuangan ini meliputi :

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 September 2023

Realisasi Pendapatan Negara pada triwulan III TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.590,000 atau mencapai 45 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.1,300,000.

Realisasi Belanja Negara pada triwulan III TA 2023 adalah sebesar Rp.133,150,000 atau mencapai 76 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.174,500,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran triwulan III TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023			TA 2022	
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara	1,300,000	590,000	45	570.000	
Belanja Negara	174,500,000	133,150,000	76	231.891.600	

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 September 2023 dan 2022 .

Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.22,721,000,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 22,721,000,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0;

Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.8,904,000,-. yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.8,904,000,-. dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.22,721,000,-, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesarRp. 22,721,000,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

Ringkasan Neraca per 30 September 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2Ringkasan Neraca per 30 September 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode N	Veraca		Kenaikan/Penuru	man
	2023	202	2	Rp.	%
Aset					/0
Aset Lancar	22.721,000		65,490,477	(42,769,477)	(cn or
Aset Tetap		0	0	NAME OF THE OWNER OF THE OWNER, WHEN THE OWNER,	(65.31
Aset Lainnya		0		0	0,0
Jumlah Aset		U	0	0	0,0
	22,721,000		65,490,477	(42,769,477)	(65.31
Kewajiban					
Kewajiban Jangka Pendek	8,904,000		0	8,904,000	
Kewajiban Jangka Panjang	C	)	0	0	
lumlah Kewajiban	8,904,000		0	8,904,000	
Ekuitas Dana					
Ekuitas Dana Lancar	13,817,000		65,490,477	(43,904,477)	1000
Ekuitas Dana Investasi	0		0		(67.04)
umlah Ekuitas Dana				0	0,00
	13,817,000		65,490,477	(51,673,477)	(78.90)
umlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	22,721,000		65,490,477	(42,769,477)	(65.31)

#### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasional, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp.590,000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.142,564,119,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(141,974.119,-)

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0 dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(141,974,119,-).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.65,490,477,-, dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(141,974,119,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.90,300,642,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp.13,817,000,-.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# I. LRA PERBANDINGAN

# I. Laporan Realisasi Anggaran

### PENGADILAN TINGGI BENGKULU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 September 2023 DAN 2022

( dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan		TA 2023		TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1,300,000	590,000	45	570.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		1,300,000	590,000	45	570,000
в.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	174,500,000	133,150,000	76	231.891.600
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		174,500,000	133,150,000	76	231.891.600

<sup>\*</sup>Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

# II. NERACA PERBANDINGAN

# II. Neraca

## PENGADILAN TINGGI BENGKULU

### **NERACA**

# PER 30 September 2023 dan 2022

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	5.000.000	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1, 2.	900,000	
Persediaan	C.1. 3.	16,821,000	
Jumlah Aset Lancar		22,721,000	65,490,477 65,490,477
set Tetap	C.2		03,430,477
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4,	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		22,721,000	65,490,477
EWAJIBAN			
wajiban Jangka Pendek	C.3		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.3. 1	900,000	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.3. 2.	3.004,000	0
Uang Muka dari KPPN	C.3. 3.	5.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8,904,000	0
Jumlah Kewajiban		8,904,000	0

Neraca LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2023

EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.4	13,817,000	65,490,477
Jumlah Ekuit:	as Dana	13,817,000	65,490,477
Jumlah Kewajiban dan Ekuita	as Dana	22,721,000	65,490,477

<sup>\*</sup>Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

# III. LAPORAN OPERASIONAL

# III. Laporan Operasional

# PENGADILAN TINGGI BENGKULU LAPORAN OPERASIONAL

PER 30 September 2023 DAN 2022

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2023	30 September 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	590,000	570.000
lumlah Pendapatan		590,000	570.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	29,816,119	27.435.640
Beban Barang dan Jasa	D. 4	16,658,000	56.530.600
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	96,090,000	158.170.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		142,564,119	242.136.240
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(141,974,119)	(241.566.240)
egiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Densit) Sebelum Pos Luar Biasa		(141.974.119)	(241.566.240)	
Pos Luar Blasa	D. 13			
Beban Luar Biasa		0	0	
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(141,974,119)	(241.566.240)	

<sup>\*</sup>Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

# IV. Laporan Perubahan Ekuitas

# PENGADILAN TINGGI BENGKULU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 30 September 2023 DAN 2022 (dalam satuan Rupiah)

	WINDS DECOME IN	-prairie	And April 1997
URAIAN	Catatan	30 September 2023	30 September 2022
Ekuitas Awal	E.1	65,490,477	78.353.450
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(141,974,119)	(241.566.240)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	E.3	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E. 4	0	433.000
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0	433.000
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 4.3	0	0
Koreksî Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 4.5	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 5	90,300,642	177.053.290
Ekuitas Akhir	E. 6	13,817,000	14.273.500

<sup>\*</sup>Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

# V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

# V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Makamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampa 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
- 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan triwulan III Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau
   Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

 Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

 Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat     Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia     Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

 Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
lak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan /arietas Tanaman Semusim.	20
lak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman ahunan	25
lak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
lak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

 Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### (7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (dulam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
Pendapatan Negara dan Hibah			
Penerimaan Perpajakan	0	0	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,300,000	1,300,000	
libah	0	0	
umlah Pendapatan dan Hibah	1,300,000	1,300,000	
Belanja			
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang	174,500,000	174,500,000	
Belanja Modal	0	(	
lumlah Belanja	174,500,000	174,500,000	

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp. 460.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp.590,000 atau mencapai 45 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1,300,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,300,000	590.000	45,38
2.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0,00
	Total Pendapatan	1,300,000	590.000	45,38

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp.590,000 atau mencapai 45 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1,300,000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya yang berasal dari Hak Redaksi Putusan Perkara Perdata.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 September TA 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	590.000	570.000	20,000	27.78
2.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0,00
	Total Pendapatan	590.000	570.000	20,000	3.51

### B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 133,150,000,- Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp.133,150,000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 76% dari anggaran senilai Rp.174,500,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Triwulan III TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023

Uraian	(dalam satuan Rupiah) Per 30 September TA 2023		
	Pagu	Realisasi	
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	174,500,000	133,150,000	76
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	174,500,000	133,150,000	76
Pengembalian Belanja	A PARTIE NAME OF THE PARTY OF T	0	0
Total Belanja Netto	174,500,000	133,150,000	76

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(dalam satuan Rupiah) 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0.00 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pegawal Belanja Barang Belanja Modal Anggaran 0.00 174,500,000 0,00 Realisasi 0,00 133,150,000. 0,00

Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023

Sumber: Laporan Keuangan TA 2023 & 2022

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp.(98,741,600,-) atau mencapai 42.58% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya pagu anggaran Belanja Barang pada Pengaadilan Tinggi Bengkulu.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turur	1)
			Rp.	
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	133,150,000	231.891.600	(98,741,600)	(42.58)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
otal Belanja	133,150,000	231.891.600	(98,741,600)	(42.58)

#### **B.2.1.** Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 91,066,000 Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 September TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.133,150,000,- dan Rp. 231.891.000.

Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp.(98,741,600,-) atau mencapai 42.58% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya pagu anggaran Belanja Barang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dimana Tahun sebelumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan pagu anggaran untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Pengganti dan Jurusita yang terealisasi pada Triwulan III TA 2022.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 30 September 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

	TA 2023	TA 2022	Perubahan		
	Realisasi	Realisasi	Rp.		
Belanja Barang Operasional	12,174,000	17.292.600	(5,118,600)	(29.60)	
Belanja Barang Non Operasional	3,380,000	24.075.000	(20,695,000)	(85.96)	
Belanja Barang Persediaan	23,406,000	19.569.000	3,837,000	19.61	
Belanja Perjalanan Dinas	94,190,000	158.170.000	(63,980,000)	(40.45)	
Belanja Jasa	0	7.985.000	(7,985,000)	(100)	
otal Belanja Brutto	133,150,000	227.091.600	(93,941,600)	41.37	
Pengembalian Belanja					
otal Belanja Netto	133,150,000	227.091.600	(93,941,600)	41.37	

### C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: C.1 Rp. 27,636,000

#### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.22,721,000 dan Rp. 65,490,477. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 September 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 September 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2023	TA 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	
Kas Lainnya dan Setara Kas	900,000	0
Persediaan	16,821,000	65,490,477
Total Aset Lancar	22,721,000	65,490,477

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 5.000.000, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September TA 2023	31 Desember TA 2022
1.	Uang Muka dari KPPN	5.000.000	
	Jumlah	5.000.000	

Kas di Bendahara Pengeluaran pada periode 30 September 2023 adalah sebesar Rp.5,000,000,-.

Kas Lainnya dan

Setara Kas:Rp.900,000,-

#### C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.900,000,- dan Rp.0 adalah saldo Lainnya pada Bendahara Penerimaan yang merupakan saldo pada Rekening Pihak Ketiga untuk menampung Biaya Perkara.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis Jenis	30 September TA 2023	31 Desember TA 2022
1.	Dana Pihak Ketiga	900,000	0
	Jumlah	900,000	0

#### C.2.3. Persediaan

Persediaan: Rp.16,821,000

Persediaan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.16,821,000 dan Rp.65,490,477. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 15Persediaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

) September 2023 (dalam satuan Rupiah) 30 September 2023 Uraian 31 Desember 2022 1 Barang Konsumsi 16,821,000 65,490,000 2 Bahan Untuk Pemeliharaan 0 0 Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual 3 0 0 atau diserahkan kepada masyarakat 4 **Barang dalam Proses** 0 0 5 Persediaan untuk Tujuan Strategis 0 0 6 Persediaan Barang Hasil Sitaan 0 0 7 Persediaan lainnya 0 0 Total 65,490,000

#### C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 September 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 September TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 September TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
ŝ	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	- 0
	Akumulasi Penyusutan			
	Nilai Buku Aset Tetap		0	0

#### C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalahsebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 17 Rincian Saldo Tanah** 

No.	KIB	Luas (m²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
	•	•	_	_		<u>.</u>
J	umlah					0

#### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2022 dan 2021masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp. Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 September 2023 dan 2022masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

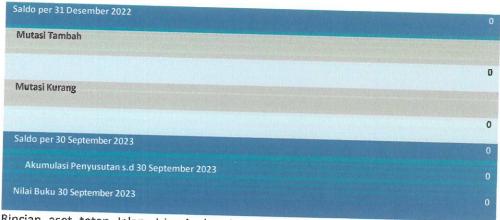
Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

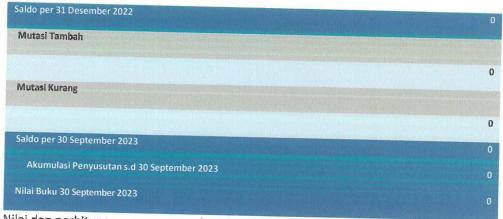
Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp. Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp. 0 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 September 2023 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	Nilai Buku	asi	Nilai Perolehan Akumulas	Uraian		No.
		tan	Penyusuta			
0		0	0	alatan dan Mesin	Pera	1
0		0	0	dung dan Bangunan	Gedi	2
0		0	0	n , Irigasi, dan Jaringan	Jalan	3
0		0	0	t Tetap Lainnya	Aset	4
0		0	0	ıh	Jumlah	
		0	0	ih	Jumlah	

### C.3. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 6,050,000. Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.8,904,000 dan Rp.0,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 September 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2023	TA 2022
Utang Kepada Pihak Ketiga	900,000	0
Utang yang Belum Ditagihkan	3.004,000	0
Uang Muka dari KPPN	5.000,000	0
Jumlah	5.000.000	0

#### C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.900,000,- dan Rp.0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan saldo Bendahara Penerimaan yang merupakan saldo pada Rekening Pihak Ketiga untuk menampung Biaya Perkara.

#### C.3.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Jumlah Utang yang Belum ditagihkan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.3.004,000,- dan Rp.0,- . Utang yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga (merupakan kwitansi UP yang belum di SP2D kan).

#### C.3.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp. 5.000.000 Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.5.000.000. dan Rp. 0,- Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

#### C.4. Ekuitas

Ekuitas: Rp.13.817.000 Ekuitas per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.13.817.000 dan Rp. 65.490.477. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBP : Rp.460.000 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.590.000 dan Rp. 570,000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 20 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,300,000	590.000	35
2.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
	Total Pendapatan	1,300,000	590.000	35

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.O. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp.16,821,000 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.16,821,000,- dan Rp. 65,490,477. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Beban Persediaan per 30 September 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	16,821,000	65.490.477	(48,669,477)	(74.32)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	16,821,000	65.490.477	(48,669,477)	(74.32)

### D.4. Beban Barang & Jasa

Beban Barang & Jasa : Rp.16,658,000 Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.16,658,000 dan Rp.56,530,600. Beban Barang & Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Beban Barang & Jasa per 30 September 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Honor Operasional Satker	0	0	0	0
Beban Bahan	3,380,000	24.075.000	(27,455,000)	(114)
Beban Pengiriman Surat Dinas PosPusat	13,278,000	14.870.600	(1.592,600)	(10.71
Beban Jasa – Penanganan PandemiCovid-19	0	3.185.000	(3,185,000)	(100)
Beban Jasa Profesi	0	9.600.000	(9,600,000)	(100)
Beban Barang Operasional Lainnya	0	4.800.000	(4,800,000)	(100)
Total Beban Jasa	16,658,000	56.530.600	(39,872,600)	(70.53

### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp.0 Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 September TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah

Uraian	30 Juni 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 96,**090,**000 Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.96,090,000 dan Rp.122,010,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	76,640,000	48.390.000	28,250,000	58.38
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	19,450,000	12.700.000	6,750,000	53.15
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	97.080.000	(97,080,000)	(100)
Total Beban Perjalanan Dinas	96,090,000	158.170.000	(62,080,000)	(11.53)

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 September 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

	30 Juni 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Uraian				
Beban Gedung dan	0	0		
Bangungan untuk		•	0	0
Diserahkan kepada				
Masyarakat/Pemda				
Beban Peralatan dan Mesin	0	0	0	
ıntuk Diserahkan kepada			U	0
Wasyarakat/Pemda				
Beban Barang Lainnya untuk	0	0		
iserahkan kepada	Ü	U	0	0
/lasyarakat/Pemda				
Total Beban Barang untuk	0	0	0	
iserahkan kepada				
Masyarakat Masyarakat				

### D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0 Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 September TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### Tabel 27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 September TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	(
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	(
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	(
Jumlah Penyusutan	0	0	0	(
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	(
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

### D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 September TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

#### D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0 Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Lain-lain per 30 September TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

### D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.0 Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Septemberi TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

### D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Pos Luar Biasa per 30 September TA 2023 dan TA 2022(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

#### E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp.13,817,000

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.13,817,000,- dan Rp.65,490,477.

### E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO: Rp.(141,974, 119)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.(141,974,119) dan Rp.(241,566,240). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

# E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan mendasar: Rp.0. Tidak terdapat transaksi dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 .

### E.4. Koreksi Menambah dan Mengurangi

### E.4.1.Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp.0.

Nilai Penyesuaian Nilai Aset per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### E.4.2.Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp.0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 433,000.

Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebagai

#### berikut:

Tabel 32 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 September TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang PersediaanLainnya	0
Total Koreksi NilaiPersediaan	0

#### Selisih Revaluasi Aset Tetap : Rp.0.

### E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

#### Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi: Rp.0

### E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

Tabel 33 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

enis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
umlah	0

#### E.4.5. Koreksi Lain-lain

KoreksiLain-lain Rp.0,

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi antar beban, koreksi antar hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 34 Rincian Koreksi Lain-lain per 30 September TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Utang	0
Koreksi Hibah	0
otal Koreksi Lain-lain	0

### E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas : Rp. 48,346,642 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.90,300,642 dan Rp.177,053,290.

Rincian Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalahsebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 September TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar entitas N	lilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	133.150.000
Diterima dari Entitas Lain	(590,000)
Transfer Keluar	(42,259,358)
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	90,300,642

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2023, DDEL sebesar Rp.(590.000),sedangkan DKEL sebesar Rp.133,150,000.

#### E.5.2 Transfer Masuk/TransferKeluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.
Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.0 terdiri dari:

Tabei 36 Rincian Transfer Masuk
(dalam satuan Rupiah)

	(Rp)
-	F

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.(42,259,358).

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.O dari total Rp.O yang diterima sepanjang tahun 2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023 adalah Rp.O.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Pengesahan Hibah

(dalam satuan Rupiah)

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
_	<u> </u>	0
		0
	Total Pengesahan	0
Pengesahan Pe	ngembalian Hibah	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran.

### E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp.13,817,000.

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.13,817,000 dan Rp. 14,273,500.

### F. Pengungkapan Penting Lainnya

## F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu dijelaskan pada periode 30 September Tahun Anggaran 2023 ini.

### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat pendapatan dan belanja akrual yang perlu dijelaskan pada periode 30 September Tahun Anggaran 2023 ini.

### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

 BRI Cabang Bengkulu A/C 0115-01-001696-30-6 an. RPL 016 PT BENGKULU UNTUK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.900.000.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) : S-3825/MK.5/2015 tanggal 11 Mei 2015.

 BRI Cabang Bengkulu A/C 654444005131000 an. BPG 016 PT Bengkulu yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.0,-.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) dari KPPN : S-820/PB.3/2021 Tanggal 03 April 2021.

### F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Biaya Perkara yaitu biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukkan gugatan perkara perdata, sesuai dengan asas tidak ada biaya, tidak ada perkara. Biaya perkara pada saat putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah. Sampai dengan 30 September 2023 jumlah biaya perkara di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.900.000.
- Biaya Konsinyasi yaitu atau yang dikenal dengan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan dan penitipan. Sampai dengan 30 September 2023 jumlah biaya konsinyasi di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.0.
- 3. Biaya Eksekusi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang menang dalam suatu perkara perdata terkait perkara bangunan atau tanah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sampai dengan 30 September 2023 jumlah biaya Eksekusi di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.O.
- 4. Biaya Perkara PHI sampai dengan 30 September 2023 yaitu sebesar Rp.0,-.
- 5. Uang Titipan Perkara Pidana sampai dengan 30 September 2023 yaitu sebesar Rp..
- 6. Biaya Lain-lain sampai dengan 30 September 2023 yaitu sebesar Rp.0.

#### F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut:

Revisi DIPA ke-1 Revisi Halaman III DIPA dan Pengesahan POK Tanggal 14 Februari 2023.

Revisi DIPA ke-2 Revisi Halaman III DIPA dan Pengesahan POK Tanggal 14 April 2023.

Revisi DIPA ke-3 Revisi Halaman III DIPA dan Pengesahan POK Tanggal 4 Juli 2023.

Revisi DIPA ke-4 Revisi Halaman III DIPA dan Pengesahan POK Tanggal 13 Oktober 2023.

### F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB per 30 September 2023pada Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

#### LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2019

Nomor SPM : 00013A PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Tanggal SPM : 17 Mei 2023 Yang telah diterbitkan SP2D :

Nomor SP2D :: 230161301006228

Tanggal SP2D : 19 Mei 2023

Koreksi dimaksud adalah karena adanya Kesalahan Rincian Output

 Sebelumnya
 1049.BCA.U02

 Menjadi
 1049.BCA.U01

### F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Sampai dengan periode 30 September 2023 Satker Pengadilan Tinggi Bengkulu terdapat perubahan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang disebabkan Kuasa Pengguna Anggaran lama pindah tugas. Berdasarkan hal tersebut Sekretaris Mahkamah Agung menunjuk serta mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang baru sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

:

Nomor: 70/PA/SK/XII/2022, yaitu

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran

Endri Novian, S.E.

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran

: Nursani, S.H.

# LAPORAN PENDUKUNG

# A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

### Pengadilan Tinggi Bengkulu

# Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

## untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2023

No.	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Manfaat		Penyusutan	
A.	Peralatan dan Mesin			0	
В.	Gedung dan Bangunan			0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			0	0
<b>D</b> .	Aset Tetap Lainnya				0
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan			0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetaj			0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetar Lainnya	o dan Aset			0

# B. INFORMASI HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA

#### PENGADILAN TINGGI BENGKULU DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA PER 30 SEPTEMBER 2023

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan
1.		0	0	0	0	
2.	•	0	0	0	0	
3.		0	0	0	0	
4.		0	0	0	0	
5.		0	0	0	0	C
	JUMLAH	0	0	0	0	0